

SKRIPSI

**AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGGUNAAN ALOKASI
DANA DESA (ADD) DI DESA MATUA KECAMATAN WOJA
TAHUN 2019**

*Accountability and transparency in the use of village fund allocations in matua
village, woja sub-district 2019*

Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana (SI)



Oleh :

NURULLITA PRISHASTI NINGSIH
NIM. 217130020

**JURUSAN URUSAN ILMU PEMERINTAHAN
PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
2021**

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

**AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGGUNAAN ALOKASI
DANA DESA (ADD) DI DESA MATUA KECAMATAN WOJA
TAHUN 2019**

Oleh:

NURULLITA PRISHASTI NINGSIH
NIM : 217130020

Untuk memenuhi ujian Sidang Skripsi
Tanggal 14 Agustus 2021

Menyetujui
Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II



Drs. Amil, M.M
NIDN. 0831126204



Inka Nusamuda Pratama, S.IP., M.IP
NIDN. 0824109204

Mengetahui,
Ketua Prodi Program Ilmu Pemerintahan




Avatullah Hadi, S.IP., M.IP
NIDN. 0816057902

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGGUNAAN ALOKASI
DANA DESA (ADD) DI DESA MATUA KECAMATAN WOJA
TAHUN 2019**

Oleh:

NURULLITA PRISHASTI NINGSIH
NIM. 217130020

Telah dipertahankan didepan penguji
Pada tanggal 14 Agustus 2021
Dinyatakan telah memenuhi persyaratan

Tim Penguji

1. **Drs. Amil, M.M**
NIDN. 0831126204


Ketua

2. **Inka Nusamuda Pratama, S.IP., M.IP**
NIDN. 0824109204


Anggota

3. **Lalu Sopan Tirta Kusuma, S.IP., M.Si**
NIDN. 0825038303


Anggota

Ketua Program Ilmu Administrasi Publik


Ayatullah Hadi, S.IP., M.IP
NIDN. 0816057902

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik


Dr. H. Mohammad Ali, M.Si
NIDN. 0806066801

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya mahasiswa Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram :

NAMA : NURULLITA PRISHASTI NINGSIH

NIM : 217130020

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul *Akuntabilitas Dan Transparansi Penggunaan Alokasi Dana Desa (Add) Di Desa Matua Kecamatan Woja Tahun 2019* merupakan hasil karya sendiri. Dalam skripsi sendiri tidak terdapat karya yang ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali sebagai acuan dan dikutip dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sadar dan tanpa rekayasa dari pihak manapun.

Mataram, 25 September 2021

Yang membuat pernyataan



NURULLITA PRISHASTI NINGSIH

NIM : 217130020



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. K.H.Ahmad Dahlan No. 1 Mataram Nusa Tenggara Barat
Kotak Pos 108 Telp. 0370 - 633723 Fax. 0370-641906
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN
PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NURULLITA PRISHASTI MINGSIH
NIM : 21730020
Tempat/Tgl Lahir : DOMPU 21 MEI 1999
Program Studi : ILMU PEMERINTAHAN
Fakultas : ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
No. Hp/Email : 082 339 767 366
Jenis Penelitian : Skripsi KTI Tesis

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama *tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta* atas karya ilmiah saya berjudul:

AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DI DESA MATUA KECAMATAN WOJA TAHUN 2019

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Mataram, 26 SEPTEMBER 2021

Penulis



NURULLITA PRISHASTI MINGSIH
NIM. 21730020

Mengetahui,
Kepala UPT Perpustakaan UMMAT



Iskandar S.Sos.M.A.
NIDN. 0802048904

MOTTO

Barang siapa bertakwa kepada Allah maka Dia akan menjadikan jalan keluar baginya, dan memberinya rezeki dari jalan yang tidak ia sangka, dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah maka cukuplah Allah baginya, Sesungguhnya Allah melaksanakan kehendak-Nya, Dia telah menjadikan untuk setiap sesuatu kadarnya.

(Q.S. Ath-Thalaq ayat 2-3)

NURULLITA PRISHASTI NINGSIH

NIM : 217130020

PERSEMBAHAN

Rasa syukur atas rahmat, taufik, dan hidayah-Nya yang diberikan oleh Allah SWT, serta dengan penuh rasa kasih sayang dan cinta. Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Kedua orang tuaku tercinta Sudirman,SH dan Dewi Sartika Ningsih, terimakasih telah merawat, membesarkan, dan mendidik serta kasih sayang yang begitu besar dan mulia, berkat do'a dan suport yang tiada henti menyelesaikan studi tepat waktu.
2. Adiku Dandi Anggara Putra, M.fadil Ibni yang selalu memberikan semangat dan do'a tiada hentinya kepada abangmu ini sehingga bisa menyelesaikan perkuliahan.
3. Terimakasih kepada seluruh Keluarga besarku Kakak, Abang, Paman , dan Bibi yang tidak bisa aku sebutkan namanya satu persatu terimakasih do'a dan suportnya serta semangat yang kalian berikan untuk membantu keberhasilan studiku dan penyusunan skripsi.
4. Semua Teman-teman Angkatan 2017 dan rekan seperjuangan khususnya kelas A Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang tiada henti memberi dukungan dan semangat.
5. Kepada teman-temanku selama di rantauan Siti Farida, Ahmand Yasin, Muchammad Nurkhaidir,Abdul Hamid, soefian, Andika Anandaita. terimakasih sudah menjadi rumah kedua tempat ku berbagi cerita suka maupun duka.
6. Almamater tercinta Universitas Muhammadiyah Mataram.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufik serta hidayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DI DESA MATUA KECAMATAN WOJA TAHUN 2019”**. Sholawat serta salam tercurahkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang bederang.

Penulis juga menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak mungkin akan terwujud apabila tidak ada bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, melalui kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan ucapan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT
2. Bapak Dr. H. Arsyad Abd Gani, M.pd selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram.
3. Bapak Dr. H. Muhammad Ali, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Mataram.
4. Bapak Ayatullah Hadi, S.IP., M.IP selaku ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan.
5. Untuk seluruh kepala staf KTU Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram yang telah banyak membantu di bidang akademik dan kemahasiswaan.
6. Bapak Drs. Amil, M.M selaku dosen pembimbing pertama yang telah bersedia membimbing serta mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini.

7. Bapak Inka Nusamuda Pratama, S.IP,. M.IP selaku dosen pembimbing kedua yang telah bersedia membimbing serta mengarahkan penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
8. Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada penulis selama menjadi mahasiswa di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram.
9. Kepala Desa Matua Bapak Syam Firdaus dan Sekretaris Desa Matua Bapak Irawansyah, S.Pd serta seluruh staf pemerintah Desa Matua Kecamatan Woja yang senantiasa membantu penulis dalam melaksanakan penelitian serta masyarakat yang telah memberikan informasi dan kerjasamanya dalam terlaksananya penelitian ini.
10. Semua pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan dan penyelesaian Skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Hal ini tidak terlepas dari keterbatasan kemampuan dan ilmu pengetahuan yang penulis miliki. Penulis berharap semua yang dilakukan menjadi amal ibadah dan dapat bermanfaat bagi kita semua. Dengan segala kerendahan hati mengharapkan kritik dan saran dari semua pembaca sebagai motivasi bagi penulis. Semoga kita selalu mendapatkan ridha dari Allah S.W.T. Aamiin Ya Rabbal`alamin.

Mataram, 24 Juni 2021
Penulis,

Nurullita Prishasti Ningsih
NIM.217130020

**AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGGUNAAN ALOKASI
DANA DESA (ADD) DI DESA MATUA KECAMATAN WOJA
TAHUN 2019**

**Oleh:
NURULLITA PRISHASTI NINGSIH
NIM:217130020**

ABSTRAK

Desa Matua dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa untuk Transparansinya masih belum dijalankan dengan baik, dimana tidak ada informasi dipapan pengumuman dalam menjalankan kegiatan Alokasi Dana Desa. Selain itu dalam Akuntabilitas permasalahan yang ada, dimana masih rendahnya kapasitas aparatur Pemerintahan Desa dalam penguasaan teknologi, manajemen dan pelayanan kepada masyarakat. Metode dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Hasil temuan dalam penelitian ini Penatausahaan pengelolaan keuangan Desa Matua sudah menggunakan format sesuai dengan lampiran dalam Permendagri nomor 113 tahun 2014 baik format Raperdes tentang APBDes, APBDes, proposal kegiatan, Rancangan Anggaran Biaya (RAB), pernyataan pertanggungjawaban belanja, buku kas umum, buku bank, buku pembantu pajak, buku pembantu kegiatan, laporan realisasi APBDes, laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes. Kemudian dari indikator Pelaporan pengelolaan keuangan Desa Matua telah terlaksana tepat waktu, Sesuai dengan Permendagri 113 tahun 2014. Ini artinya pelaporan berjalan dengan baik. Tahap pertanggungjawaban Desa Matua telah dilaporkan oleh Kepala Desa kepada bupati sesuai laporan pertanggungjawaban tahun 2020 sudah menggunakan format laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes sesuai Permendagri nomor 113 tahun 2014. Dari segi Transparansi untuk Desa Matua sudah sesuai dengan Permendagri 113 tahun 2014, yakni adanya musrenbangdes setiap awal tahun untuk mengapresiasi ide atau keluhan warga, selalu menginformasikan secara tertulis jumlah dana yang didapat dari pemerintah.

Kata Kunci: Akuntabilitas, Transparansi, Alokasi Dana Desa (ADD)

**THE ACCOUNTABILITY AND TRANSPARENCY OF VILLAGE FUND
ALLOCATION (ADD) IN MATUA VILLAGE,
WOJA DISTRICT, 2019**

By:
NURULLITA PRISHASTI NINGSIH
NIM:217130020

ABSTRACT

Village Fund Allocation of Matua Village has not been properly managed for transparency, as there is no information on the bulletin board in carrying out Village Fund Allocation activities. In the other hand, the current problems related to the accountability of the village government officials' capacity to grasp technology, administration, and community services is still limited. This study employs a descriptive qualitative approach. The findings in the study show that the financial management administration of Matua Village has follow the attachment in Permendagri No. 113 of 2014 both in the format of the Raperdes on APBDes, APBDes, activity proposals, Draft Budget (RAB), statement of expenditure accountability, general cash book, bank book, tax subsidiary book, activity subsidiary book, APBDes realization report, and accountability report on the realization of APBDes implementation. Then from the indicators of reporting on the financial management of Matua Village, it has completed on time, related to the Permendagri 113 of 2014. It indicates that reporting is proceeding well. The Village Head of Matua Village regularly has been sending the report to the regent based on the form of the 2020 accountability report, in accordance with Permendagri Number 113 of 2014. In terms of transparency, Matua Village complies with Permendagri 113 of 2014, which stipulates the existence of *musrenbangdes* of the early year to appreciate residents' suggestions or concerns, and to inform the amount of funds collected from the government.

Keywords: *Accountability, Transparency, Village Fund Allocation (ADD)*



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I : PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.4 Manfaat Penelitian	4
1.4.1 Manfaat Akademik.....	4
1.4.2 Manfaat Lembaga.....	4
1.4.3 Manfaat Penulis.....	4
1.4.4 Manfaat Pembaca	4
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	5
2.1 Penelitian Terdahulu	5
2.2 Landasan Teori.....	8
2.2.1 Desa.....	8
2.2.2 Transparansi	10
2.2.3 Akuntabilitas	11
2.3 Kerangka Berpikir.....	13
BAB III : METODE PENELITIAN	15

3.1 Jenis Penelitian.....	15
3.2 Lokasi Dan Waktu Penelitian	15
3.3 Jenis Dan Sumber Data	16
3.3.1 Data Primer.....	16
3.3.2 Data Sekunder.....	16
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	17
3.4.1 Obsevasi.....	17
3.4.2 Wawancara	17
3.4.3 Dokumentasi.....	18
3.5 Teknik Analisis Data.....	18
3.5.1 Reduksi Data	19
3.5.2 Penyajian Data	19
3.5.3 Penarikan Kesimpulan	19
BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN	20
4.1 Profil Lokasi Penelitian.....	20
4.1.1 Deskripsi Umum Lokasi Penelitian.....	21
4.1.2 Visi Dan Misi Kantor Desa Matua	22
4.1.3 Struktur Organisasi Kantor Desa Matua.....	22
4.2 Pembahasan Hasil Penelitian	27
4.2.1 Akuntabilitas Penggunaan (ADD) di Desa Matua	28
4.2.1.1 Penatausaha	29
4.2.1.2 Pelaporan	32
4.2.1.3 Pertanggungjawaban.....	33
4.2.1.4 Transparansi.....	35
4.2.2 Kendala-Kendala Yang Dihadapi Dalam Mengimplementasikan Prinsip Akuntabilitas Dan Transparansi Di Desa Matua Kecamatan Woja	37
BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN.....	40
5.1 Kesimpulan	40
5.2 Saran.....	42
DAFTAR PUSTAKA	43

DAFTAR TABEL

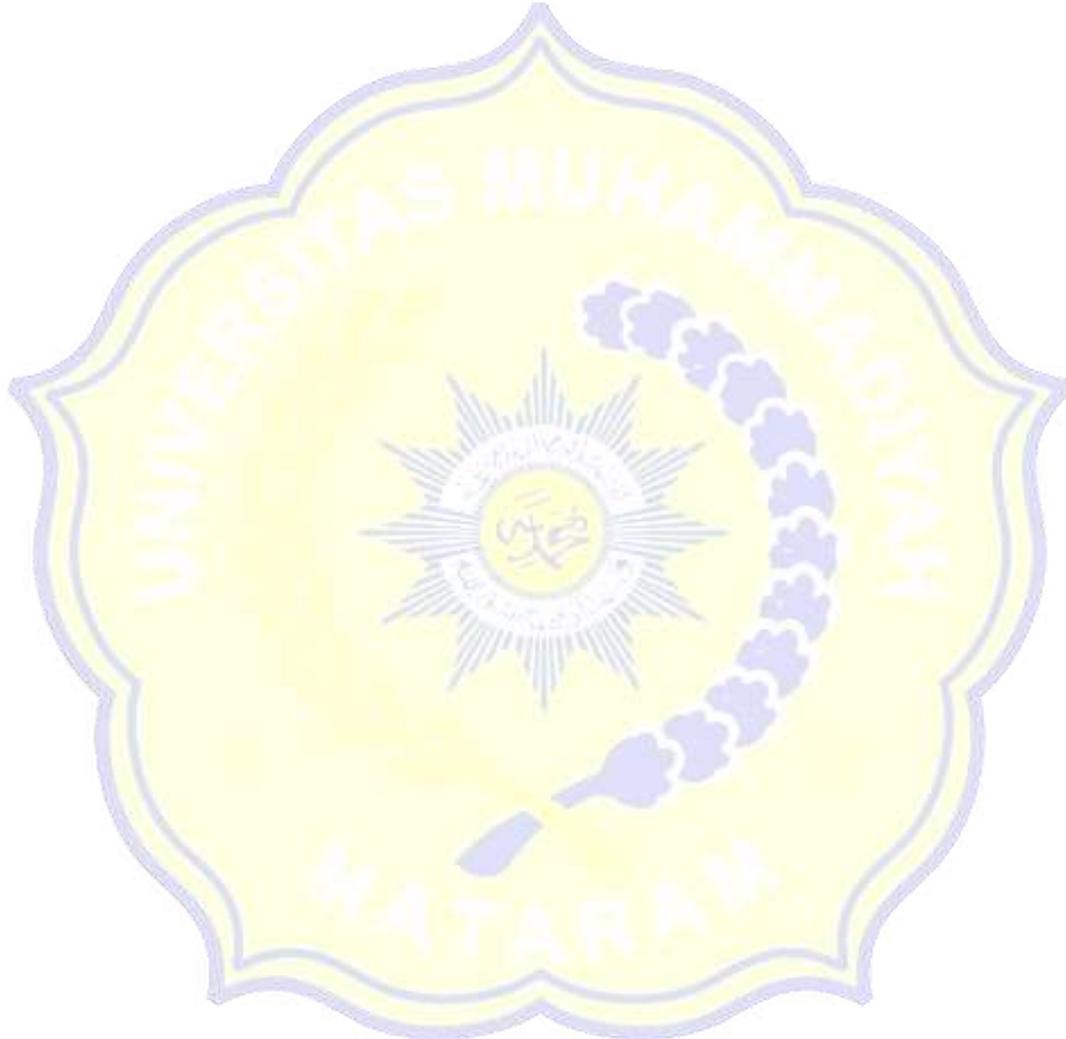
Halaman

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	5
Tabel 4.1 Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Per Sumberdana Pemerintah Desa Matuatahun Anggaran 2020	23
Tabel 4.2 Program Kegiatan ADD di Desa Matua Kecamatan Woja.....	27
Tabel 4.3 Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Matua	30
Tabel 4.4 Buku KAS Umum.....	30
Tabel 4.5 Indikator Kesesuaian Akuntabilitas Penatausahaan Menurut Permendagri 113 tahun 2014	31
Tabel. 4.6 Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Apbdes) Desa Matua Tahun Anggaran 2020.....	32
Tabel 4.7 Indikator Kesesuaian Akuntabilitas Pelaporan Menurut Permendagri 113 tahun 2014.....	33
Tabel 4.8 Indikator Kesesuaian Akuntabilitas Pertanggungjawaban Menurut Pemendagri 113 tahun 2014.....	34
Tabel 4.9 Indikator Kesesuaian Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Menurut Permendagri 113 tahun 2014.....	36

DAFTAR GAMBAR

Halaman

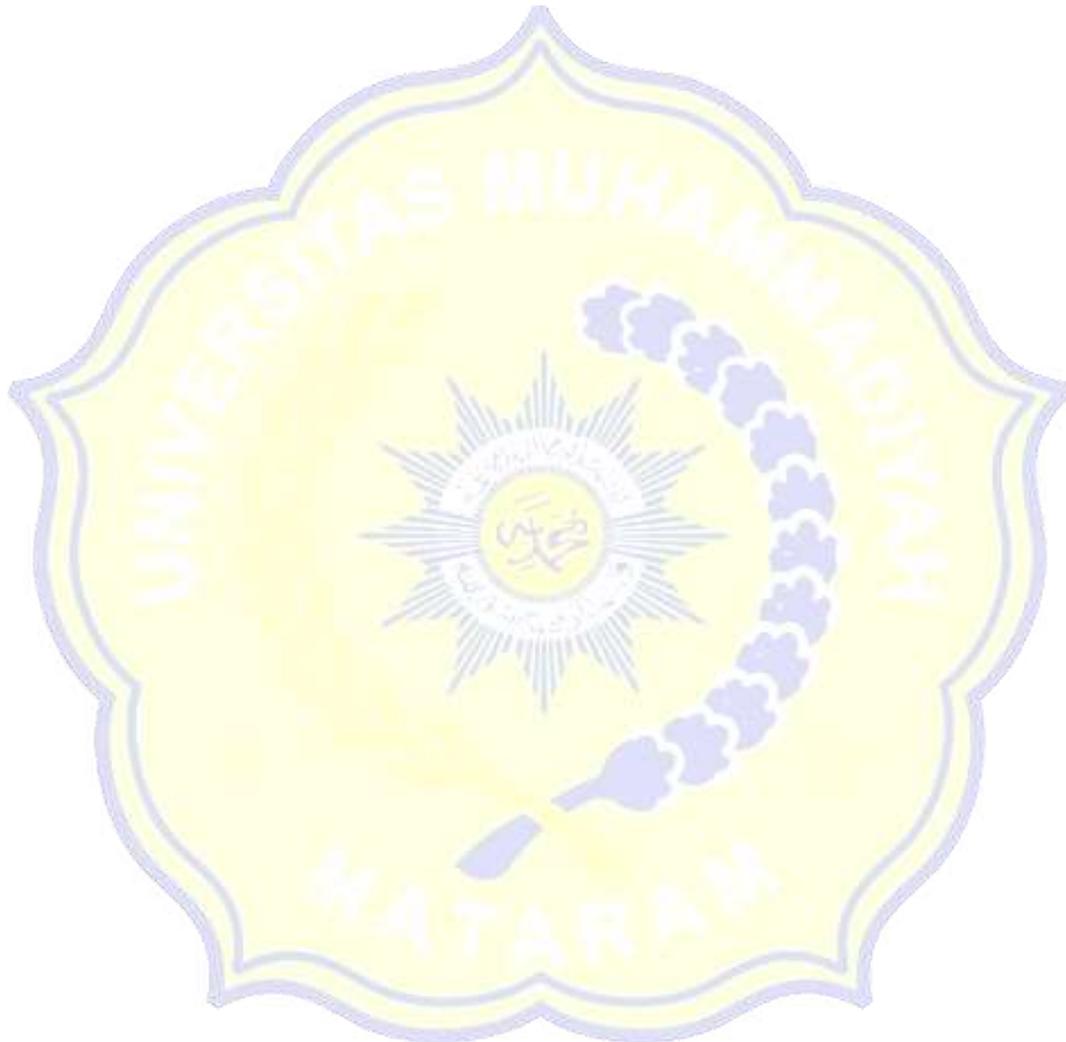
Gambar 2.1 Kerangka Berpikir	14
Gambar 4.1 Peta Desa Matua.....	20
Gambar 4.2 Struktur Organisasi Desa Matua	22



DAFTAR LAMPIRAN

Halaman

Gambar 1. Dokumentasi Bersama Kepala Desa Matua	42
---	----



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Desa sebagai unit organisasi pemerintah yang berhadapan langsung dengan masyarakat dengan segala latar belakang kepentingan dan kebutuhannya mempunyai peranan yang strategis, khususnya dalam pelaksanaan tugas di bidang pelayanan publik. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah mengatur keuangan dan aset Desa dalam rangka memberikan pelayanan pada masyarakat antara lain yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, adanya kewajiban bagi Pemerintah dari pusat sampai dengan Kabupaten atau Kota untuk memberikan transfer dana bagi Desa, hibah ataupun donasi. Salah satu bentuk transfer dari pemerintah untuk menunjang pembangunan di Desa adalah Alokasi Dana Desa (ADD). Alokasi Dana Desa adalah dana yang diberikan kepada Desa yang berasal dari dana perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten atau Kota. Bantuan Langsung Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan dana bantuan langsung yang dialokasikan kepada Pemerintah Desa digunakan untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat, kelembagaan dan prasarana Desa yang diperlukan atau diprioritaskan oleh masyarakat, yang pemanfaatannya dan administrasi pengelolaannya dilakukan dan dipertanggungjawabkan oleh Kepala Desa. Pelaksanaan Alokasi Dana Desa ini digunakan untuk program-program fisik dan non fisik yang berhubungan dengan Perkembangan Desa.

Desa Matua merupakan salah satu Desa yang terletak di Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu. Mayoritas penduduk Desa Matua adalah sebagai buruh tani. Desa Matua adalah salah satu Desa yang melaksanakan Alokasi Dana Desa. Adapun Alokasi Dana Desa yang diterima yaitu pada Tahun 2020 sebesar Rp. 808.804.800. Dengan melihat jumlah tersebut anggaran yang diberikan bisa dikatakan sangat besar.

Pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan Pemerintahan Desa, perlu adanya suatu aspek tata Pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Salah unsur utama dari *Good Governance* adalah Akuntabilitas. Akuntabilitas adalah bentuk tanggungjawab pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Jadi, Akuntabilitas pemerintahan sangat diperlukan sebagai penunjang penerapan otonomi Desa agar dapat berjalan dengan baik (Putriyanti, 2012).

Selain Akuntabilitas untuk pelaksanaan Pemerintahan yang baik juga diperlukan adanya unsur Transparansi. Sulistiyani (2004) menyatakan bahwa Transparansi dan Akuntabilitas adalah dua kata kunci dalam penyelenggaraan Pemerintahan maupun penyelenggaraan perusahaan yang baik (*Good Governance*). Transparansi ditandai oleh apakah kebijakan, regulasi, program, anggaran dan kegiatan pemerintah terbuka pada publik.

Permasalahan yang ditemui peneliti pada saat observasi awal yaitu di Desa Matua dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa untuk Transparansinya masih belum dijalankan dengan baik, dimana tidak ada informasi dipapan pengumuman dalam menjalankan kegiatan Alokasi Dana Desa. Selain itu dalam Akuntabilitas permasalahan yang ada, dimana masih rendahnya kapasitas aparatur Pemerintahan

Desa dalam penguasaan teknologi, manajemen dan pelayanan kepada masyarakat. Masalah lainnya yang sering dihadapi seperti yang disampaikan oleh Sekretaris Desa Matua yaitu keterlambatan anggaran Alokasi Dana Desa dari pusat yang sering terjadi diawal Tahun yang menyebabkan penghasilan tetap untuk pembayaran gaji perangkat desa, listrik, dan biaya operasional mengalami keterlambatan. Selain itu program Alokasi Dana Desa yang telah direncanakan tidak dapat terlaksana dengan baik akibat keterlambatan anggaran dan disebabkan karena masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa sehingga program-program yang telah direncanakan oleh Pemerintah Desa tidak dapat berjalan sesuai perencanaan yang telah dibuat.

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan diatas, maka permasalahan yang dibahas dalam penelitian adalah bagaimana akuntabilitas dan transparansi penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Matua Kecamatan Woja yang ada di Kabupaten Dompu.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan sebelumnya maka adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana akuntabilitas dan transparansi penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Matua Kecamatan Woja?
2. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi dalam mengimplementasikan prinsip akuntabilitas dan transparansi di Desa Matua Kecamatan Woja?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada maka adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan Pemerintah Desa dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Matua Kecamatan Woja.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam mengimplementasikan prinsip akuntabilitas dan transparansi di Desa Matua Kecamatan Woja.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu manfaat, antara lain sebagai berikut:

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dalam Ilmu Pemerintahan yang berkaitan dengan upaya serta minimnya akuntabilitas dan transparansi dalam penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Matua Kecamatan Woja.
2. Secara akademis, hasil penelitian ini adalah sebagai syarat memperoleh gelar S1 Ilmu Pemerintahan di Universitas Muhammadiyah Mataram.
3. Secara praktis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi peneliti dan pembaca serta khususnya Pemerintah Desa Matua Kecamatan Woja Kabupaten Dompu. Selain itu, dapat memberikan manfaat bagi masyarakat luas.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu yang relevan telah mengilhami penelitian ini, baik sebagai referensi, pembanding maupun sebagai dasar pemilihan topik penelitian. Diantaranya yaitu:

TABEL 2.1
PENELITIAN TERDAHULU

No	Peneliti	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
1	Baiq Kisnawati, dkk (2019)	Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa Besar	Mix Methode	Transparansi dalam pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Moyo Hilir Sumbawa Besar dilihat dari aspek perencanaan maupun aspek pelaksanaan sudah baik atau sudah transparan. Sedangkan Akuntabilitas pengelolaan ADD ditinjau dari aspek pelaksanaan maupun pengawasan dan pertanggungjawaban juga sudah baik atau sudah dapat dikatakan akuntabel	a. Persamaan Penelitian yang dilakukan oleh Baiq Kisnawati pada tahun 2019 dengan penelitian saya adalah sama-sama mengkaji permasalahan dalam Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) b. Perbedaan Sedangkan yang membedakan penelitian saya yaitu terletak pada focus penelitian, jika Baiq Kisnawati fokus pada Peranan Hukum dalam transparansi dan akuntabilitas, sedangkan saya fokus pada transparansi dan akuntabilitas ADD
2	Made Wiradarma Setiawan, dkk (2017)	Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Pelaporan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus Desa Bengkel, Kec. Busungbiu, Kab. Buleleng)	Kualitatif	(1) penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) dari Pemerintah Daerah ke Pemerintah Desa Bengkel sudah mengacu pada Peraturan bupati nomor 84 tahun 2015 tentang tata cara pengalokasian Dana	a. Persamaan Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Made Wiradarma Setiawan pada tahun 2017 dengan penelitian saya adalah sama-sama mengkaji permasalahan dalam Transparansi Dan

				Desa, Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak. (2) pengimplementasian prinsip transparansi dan akuntabilitas pada Alokasi Dana Desa dapat dilihat pada saat melakukan perencanaan dan pembuatan laporan realisasi dan SPJ, (3) faktor yang mempengaruhi sulitnya mengimplementasikan prinsip Transparansi dan Akuntabilitas dalam pertanggungjawaban pemerintah desa terhadap pelaporan Alokasi Dana Desa lemahnya sumber daya manusia aparat desa	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) b. Perbedaan Sedangkan yang membedakan penelitian saya yaitu terletak pada fokus penelitian. Jika Made fokus pada pencegahan, saya lebih mefokuskan pada transparansi dan akuntabilitas ADD
3	Putu Andi SuarJaya Putra,dkk (2017)	Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Bubunan Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng	Kualitatif	(1) pengelolaan dana Alokasi Dana Desa di Desa Bubunan secara bertahap sudah menerapkan prinsip akuntabilitas yang didukung prinsip transparansi, partisipasi dan responsif. (2) Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Bubunan terdapat kendala-kendala yang dihadapi berupa lemahnya sumber daya manusia aparatur desa. (3) Pemerintahan desa yang tidak transparan dan akuntabel akan menimbulkan kecurigaan dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintahan desa	a. Persamaan Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Putu Andi pada tahun 2017 dengan penelitian saya adalah sama-sama mengkaji permasalahan dalam Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) b. Perbedaan Sedangkan yang membedakan penelitian saya yaitu terletak pada fokus penelitian. Jika Putu Andi fokus pada pencegahan, saya lebih mefokuskan pada transparansi dan akuntabilitas ADD
4	Sari Pebriyanti, dkk (2020)	Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Tangai Kecamatan Rambang Kuang	Kualitatif	transparansi dan akuntabilitas alokasi dana desa di Desa Tangai tahun 2017-2019 pada tahap perencanaan, partisipasi masyarakat masih rendah dalam	a. Persamaan Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Sari Pebriyanti pada tahun 2020 dengan penelitian saya adalah sama-sama mengkaji permasalahan dalam

				mengikuti musyawarah yang mencerminkan kurangnya tingkat kepedulian dan kesadaran masyarakat untuk berperan aktif dalam pembangunan desa.	Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi b. Perbedaan Sedangkan yang membedakan penelitian saya yaitu terletak pada fokus penelitian. Jika Sari fokus pada pencegahan, saya lebih mefokuskan pada transparansi dan akuntabilitas ADD
5	Ekasary Paradenti (2017)	PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PROSES PENGAWASAN ANGGARAN DANA DESA (ADD) (Studi Kasus di Desa Kuma Selatan Kecamatan Essang Selatan Kabupaten Talaud	Kualitatif	Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pengawasan anggaran dana desa dari hasil penelitian menunjukkan masih sangat kurang dilaksanakan oleh masyarakat Desa. Hal ini disebabkan karena kurangnya pemahaman masyarakat terhadap proses pengawasan. Tujuan pengawasan anggaran dana desa (ADD) merupakan alat kontrol dalam mencegah timbulnya kebocoran, penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang.	a. Persamaan Penelitian yang dilakukan oleh Almas Ghaliya Putri Sjafrina pada tahun 2020 dengan penelitian saya adalah sama-sama mengkaji permasalahan dalam Alokasi Dana Desa (ADD) b. Perbedaan Sedangkan yang membedakan penelitian saya yaitu terletak pada fokus penelitian, jika Ekasary fokus Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Pengawasan Anggaran Dana Desa, sedangkan saya fokus pada transparansi dan akuntabilitas ADD

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa, kesamaan penelitian saat ini dengan penelitian terdahulu yaitu sama-sama mengkaji Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) yang minim sekali dilakukan oleh Pemerintah Desa. Sementara perbedaan dalam penelitian ini dan penelitian terdahulu terletak pada fokus aktor yang terlibat dalam Proses Pengawasan Anggaran Dana Desa serta transparansi dan akuntabilitas Alokasi Dana Desa.

2.2 Landasan Teori

2.3 Desa

Para ahli dalam bidang desa memberikan pengertian atau batasan yang berbedabeda mengenai desa, namun demikian dari berbagai definisi tersebut mempunyai inti dan tujuan yang sama. Berikut beberapa definisi yang diungkapkan oleh para pakar tentang pengertian desa :

- a) Menurut R. Bintarto, desa adalah perwujudan atau kesatuan geografi, sosial, ekonomi, politik, serta kultural yang terdapat di suatu daerah dalam hubungan dan pengaruhnya secara timbal balik dengan daerah lain.
- b) Menurut Rifhi Siddiq, desa adalah suatu wilayah yang mempunyai tingkat kepadatan rendah yang dihuni oleh penduduk dengan interaksi sosial yang bersifat homogen, bermata pencaharian di bidang agraris serta mampu berinteraksi dengan wilayah lain di sekitarnya.
- c) Menurut Paul H. Landis, desa adalah suatu wilayah yang penduduknya kurang dari 2.500 jiwa, dengan ciri-ciri antara lain memiliki pergaulan hidup yang saling mengenal satu sama lain (kekeluargaan), ada pertalian perasaan yang sama tentang kesukaan terhadap kebiasaan, serta cara berusaha bersifat agraris dan sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor alam, seperti iklim, keadaan alam, dan kekayaan alam.
- d) Menurut Sutardjo Kartohadikusumo, desa adalah suatu kesatuan hukum dan di dalamnya bertempat tinggal sekelompok masyarakat yang berkuasa menadakan pemerintahan sendiri.

Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa desa adalah suatu kepadatan rendah yang terdiri dari beberapa kampung, dusun

banjar, serta jorong yang berada di bawah kecamatan dan dipimpin oleh kepala desa.

Menurut undang-undang no 6 tahun 2014, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI, kewenangan berdasarkan hak asal-usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa desa atau prakarsa masyarakat desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.

Desa memiliki kewenangan yang tertuang dalam undang-undang No 6 tahun 2014 tentang desa, yang meliputi kewenangan dibidang penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Tujuan pembentukan desa adalah untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintah terhadap pelayanan masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemajuan pembangunan desa. Pemerintah desa menurut undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, pemerintah desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa berkedudukan di wilayah Kabupaten/Kota.

2.4 Transparansi

Menurut Mahmudi (2011:17) Transparansi memiliki arti keterbukaan organisasi dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang menjadi pemangku kepentingan. Transparansi juga berarti adanya penjelasan manajemen organisasi sektor publik

tentang aktivitas ,program dan kebijakan yang sudah, dan akan dilakukan beserta sumber daya yang digunakannya.

Beberapa manfaat penting dengan adanya transparansi anggaran yaitu:

- a) Mencegah korupsi
- b) Meningkatkan akuntabilitas pemerintah sehingga masyarakat akan lebih mampu untuk mengukur kinerja pemerintah, lebih mudah mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan kebijakan
- c) Meningkatkan kepercayaan terhadap komitmen pemerintah memutuskan kebijakan tertentu menguatkan kohesi, sosial karena kepercayaan publik terhadap pemerintah akan terbentuk

Menurut permendagri nomor 20 tahun 2018 tentang pengeolaan keuangan desa adalah:

- a) Laporan realisasi dan pertanggungjawaban realisasi perencanaan APBD desa di informasikan kepada masyarakat secara tertulis dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.
- b) Laporan realisasi dan laporan peratnggungjawaban realisasi pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Camat.

2.5 Akuntabilitas

Menurut Wijaya (2018:48) akuntabilitas adalah perwujudan kewajiban mempertanggungjawaban pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang sudah ditetapkan. Akuntabilitas menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir

kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sesuai Permendagri Nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa beberapa indikator yang dilakukan untuk pengukuran dalam penelitian ini yakni:

a) Tahap Perencanaan

- 1) Penatausahaan dilakukan oleh bendahara desa
- 2) Bendahara desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib
- 3) Bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban
- 4) Laporan pertanggungjawaban disampaikan setiap bulan kepada kepala desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

b) Tahap Pelaporan/Pertanggungjawaban

1. Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBD desa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran.
2. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBD desa terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
3. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBD desa ditetapkan dengan peraturan desa.

Menurut Mardiasmo (2018:27) akuntabilitas dibagi menjadi dua yaitu akuntabilitas vertikal (*vertikal Accountability*) dan akuntabilitas horizontal (*horizontal accountability*).

- a) Akuntabilitas vertical (*vertikal Accountability*) adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya pertanggungjawaban unit kerja (dinas) kepada pemerintah daerah.
- b) Akuntabilitas horizontal (*horizontal accountability*) adalah akuntabilitas kepada publik secara luas atau terhadap sesama lembaga lainnya yang tidak memiliki hubungan atas-bawah.

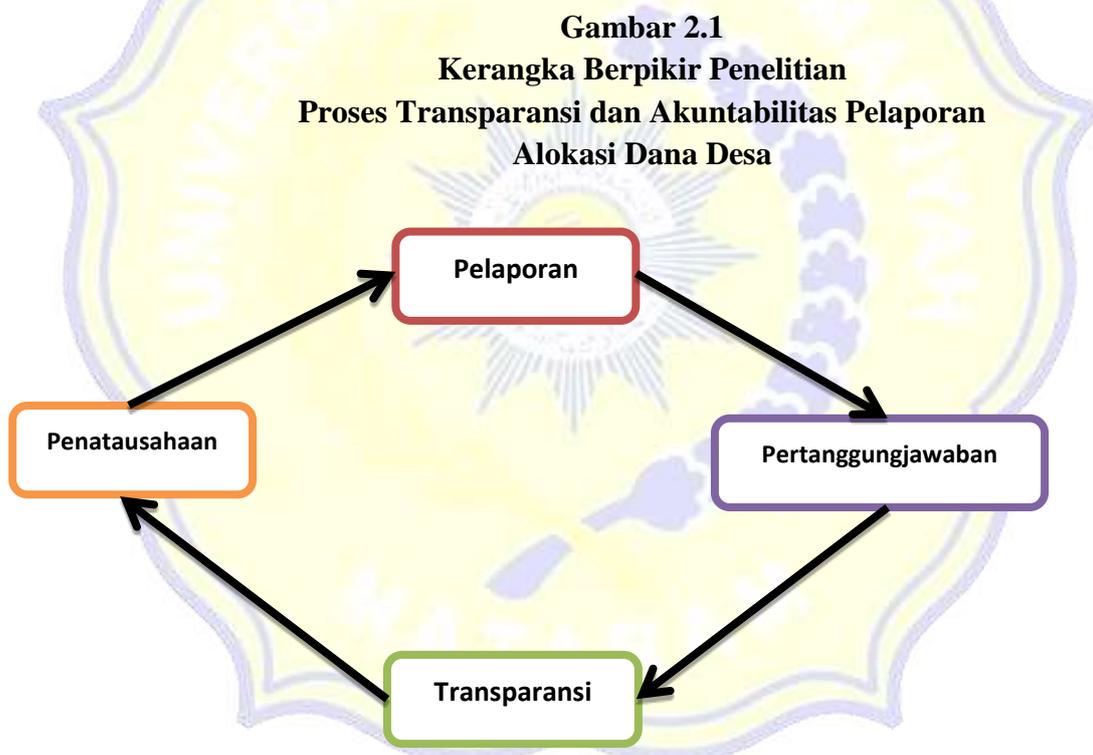
Menurut Mahmudi (2011:11) akuntabilitas publik terdiri dari beberapa aspek akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik, yaitu:

- a) Akuntabilitas hukum dan kejujuran (*accountability for probity and legality*) adalah akuntabilitas lembaga-lembaga publik untuk berperilaku jujur dalam bekerja dan menaati ketentuan hukum yang berlaku
- b) Akuntabilitas manajerial (*managerial accountability*) adalah pertanggungjawaban lembaga publik untuk melakukan pengelolaan organisasi secara ekonomis, efisiensi dan efektif
- c) Akuntabilitas program (*program accountability*) adalah program-program organisasi hendaknya merupakan program yang bermutu dan bermanfaat untuk rakyat bukan sekedar program untuk menghabiskan anggaran yang tidak jelas tujuannya
- d) Akuntabilitas kebijakan (*policy accountability*) adalah kebijakan yang terkait dengan pertanggungjawaban atas kebijakan yang diambil
- e) Kibijakan finansial (*financial accountability*) adalah pertanggungjawaban lembaga-lembaga publik untuk menggunakan uang publik (*publik money*) secara ekonomis, efisiensi, dan efektif, tidak ada pemborosan dan kebocoran dana serta korupsi.

2.6 Kerangka Berfikir

Kerangka Berfikir Penelitian ini dilihat dari segi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan/pertanggungjawaban pengelolaan alokasi dana desa apakah perencanaan tersebut dapat terbuka atau dipublikasikan kepada masyarakat. Selain transparansi dalam pengelolaan alokasi dana desa diperlukan juga akuntabilitas dengan adanya akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa dapat di pertanggungjawabkan.

Berdasarkan teori diatas maka kerangka berpikir dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Sumber: Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 35

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Menurut Sukmadinata (2011), penelitian deskriptif kualitatif ditujukan untuk mendeskripsikan dan menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik bersifat alamiah maupun rekayasa manusia, yang lebih memperhatikan mengenai karakteristik, kualitas, keterkaitan antar kegiatan. Selain itu, Penelitian deskriptif tidak memberikan perlakuan, manipulasi atau perubahan pada variable-variabel yang diteliti, melainkan menggambarkan suatu kondisi yang apa adanya. Satu-satunya perlakuan yang diberikan hanyalah penelitian itu sendiri, yang dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hal yang mendasari peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif tidak terlepas dari tujuan penelitian ini yaitu ingin mengetahui bagaimana Akuntabilitas dan Transparansi Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Matua Kecamatan Woja secara mendalam dengan menggali informasi dari subjek dan objek penelitian untuk melengkapi data peneliti agar informasi yang peneliti olah akurat dan bisa dipertanggungjawabkan.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi yang dipilih oleh peneliti yang akan menjadi fokus dalam melaksanakan penelitian ini adalah berdasarkan pertimbangan waktu, biaya dan tenaga karena lokasi tersebut terjangkau oleh peneliti. Selain itu, peneliti melihat objek pengambilan data di Desa Matua Kecamatan Woja relevan dengan judul yang diangkat oleh peneliti. Penelitian ini dilakukan selama dua bulan (Juli-Agustus).

3.3 Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua sumber data agar hasil penelitian maksimal. Data yang peneliti gunakan adalah jenis data primer dan sekunder.

3.3.1 Data Primer

Data primer adalah data dalam bentuk verbal atau kata-kata yang diucapkan secara lisan, gerak-gerik atau perilaku yang dilakukan oleh subjek yang dapat dipercaya, yakni subjek penelitian atau informan yang berkenaan dengan variabel yang diteliti atau data yang diperoleh dari responden secara langsung (Arikunto, 1998). Dalam penelitian ini, subjek penelitian atau informan yang dipilih sebagai sumber data primer yaitu Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Ketua BPD mengenai penggunaan dana Desa pada Desa Matua Kecamatan Woja, tokoh masyarakat 5 orang.

3.3.2 Data Sekunder

Data sekunder, adalah data yang diperoleh dari teknik pengumpulan data yang menunjang data primer (Arikunto, 1998). Dalam penelitian ini, diperoleh dari hasil observasi yang dilakukan oleh penulis serta dari studi literatur. Sehingga, dapat dikatakan data sekunder ini bisa berasal dari dokumen–dokumen, undangan–undangan, arsip dan data–data lain yang dibutuhkan peneliti untuk menambah data penelitian.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Berdasarkan sumber pengambilan data, dalam penelitian ini peneliti menggunakan data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari objek yang diteliti melalui prosedur dan teknik pengambilan data

yang berupa observasi, wawancara maupun penggunaan instrument pengukuran lainnya yang khusus dirancang sesuai dengan tujuan peneliti (Adi, 2004).

1. Observasi

Purwanto (dalam Basrowi dan Suwandi, 2008) mengatakan istilah observasi adalah metode atau cara menganalisis dan pencatatan secara sistematis mengenai tingkah laku dengan cara melihat atau mengamati langsung individu atau kelompok yang dituju. Peneliti melakukan observasi secara partisipan (participant observation), yaitu peneliti akan terlibat dengan kegiatan subjek yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian (Basrowi dan Suwandi, 2008). Tujuan dilakukan pengamatan ini terutama untuk membuat catatan atau deskripsi mengenai perilaku yang nyata dan memahami perilaku tersebut (Adi, 2004).

2. Wawancara

Disamping observasi lapangan, peneliti juga menggunakan metode wawancara untuk pengumpulan data. Menurut Adi (2004) wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yaitu melalui hubungan pribadi antara peneliti dengan sumber data. Wawancara dilakukan karena ada anggapan bahwa hanya subjeklah yang mengerti tentang diri mereka sendiri sehingga informasi yang tidak didapatkan melalui pengamatan atau alat lain, akan diperoleh melalui wawancara.

3. Dokumentasi

Dokumen menurut Sugiyono, merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu (Sugiyono,2008). Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dokumen berupa foto, gambar, serta data-data. Dengan adanya dokumentasi tersebut, akan membantu peneliti bahwa penelitian memang sah dan bisa dipercaya.

3.5 Teknik Analisa Data

Menurut Adi (2004), analisis data merupakan langkah yang terpenting untuk memperoleh temuan-temuan hasil penelitian. Analisis data yaitu proses pengumpulan data agar dapat ditafsirkan. Analisis data dilakukan pada saat mengumpulkan data dan setelah pengumpulan data. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode analisis kualitatif yaitu metode yang bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai subjek yang diteliti dan tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis Menurut Miles dan Huberman (dalam Basrowi dan Suwandi, 2008) ada tiga kegiatan yang dilakukan dalam melakukan analisis data diantaranya dengan:

1. Reduksi Data

Tahap ini merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian, pengabstraksian dan pentransformasikan data kasar yang diambil dari lapangan. Inti dari reduksi data adalah proses penggabungan dan penyeragaman segala bentuk data menjadi bentuk tulisan yang akan dianalisis.

2. Penyajian Data

Setelah data-data tersebut terkumpul kemudian peneliti mengelompokkan hal-hal yang serupa menjadi kategori atau kelompok-kelompok agar peneliti lebih mudah untuk melakukan pengambilan kesimpulan.

3. Menarik Kesimpulan

Pada tahap ini, peneliti membandingkan data-data yang sudah didapat dengan data-data hasil wawancara dengan subjek dan informan yang bertujuan untuk menarik kesimpulan.

